



Pajak Hiburan Di Jakarta Di Hapus

“Pertandingan olahraga yang sifatnya mencari bibit baru olahragawan tak dikenai pajak.”

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriaannya menghapus pajak hiburan untuk kesenian tradisional di DKI Jakarta. Menurut Tjahjo, besar pajak kesenian tradisional tak bisa disamakan dengan kesenian internasional. “Jadi, pajak hiburan untuk kesenian tradisional kita bikin jadi nol persen. Kalau tidak begitu, kesenian tradisional tak akan berkembang,” ujarnya kemarin.

Pajak hiburan lazimnya dikenakan pada jasa penyelenggara hiburan, seperti bioskop, pertunjukan kesenian, pameran, dan pertandingan olahraga. Menurut Tjahjo, setelah aturan baru terbit, kesenian atau hiburan lokal dan internasional masih dikenai pajak. Menurut dia, pajak hiburan lokal sebesar 5 persen. Adapun pajak hiburan internasional mencapai 15 persen.

Tjahjo mengatakan koreksi peraturan daerah ini berlaku sejak Januari 2015. Peraturan ini baru berlaku di DKI Jakarta karena hanya daerah yang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama itu yang menyampaikan Rancangan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri. “Kalau ditemukan di daerah lain, akan berlaku juga,” kata dia.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan penghapusan pajak ini sesuai dengan Nawacita — program prioritas — Presiden Joko

Widodo, yakni memajukan kesenian tradisional. Selain kesenian, kegiatan olahraga mendapat perlakuan serupa. “Pertandingan olahraga yang sifatnya mencari bibit baru olahragawan tak dikenai pajak. Sedangkan yang bersifat internasional, misal mendatangkan NBA, tetap dikenai pajak 15 persen,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan penghapusan pajak hiburan tradisional tak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun asas kehati-hatian juga harus diterapkan. Jangan sampai, ujar dia, pihak asing memanfaatkan peraturan ini dengan menyaru dengan membuat sanggar kesenian tradisional.

Heru berharap aturan ini dapat menggenjot perkembangan kesenian tradisional. Selain penghapusan pajak, kata dia, gedung pertunjukan memberikan diskon untuk kesenian tradisional dan lokal. Bahkan sebaiknya pajak untuk kesenian internasional dinaikkan lagi. “Lebih bagus lagi kalau komponen internasional dinaikkan, komponen lokal dikurangi,” ujarnya.

Ketua Dewan Kesenian Jakarta Irawan Karsono mengapresiasi langkah pemerintah pusat. Irawan mengakui kesenian tradisional sulit berkembang. Adanya peraturan ini, kata dia, akan menjadi pemicu seniman tradisional mengembangkan diri. “Lagi

pula PAD Jakarta kan sudah tinggi, jadi memang harus bantu kesenian tradisional,” ujarnya.

Menurut Irawan, di Jakarta masih ada kesenian tradisional yang rutin tampil, yakni Wayang Orang Bharata di Senen dan Kelompok Sandiwara Miss Tjitjih. Dengan adanya penghapusan pajak, kata dia, diharapkan ongkos produksi kedua kesenian tradisional itu berkurang.

● TIKA PRIMANDARI